

# Kesiapan Elemen Support, Capacity Dan Value Untuk Pengembangan E-Government Pada Aplikasi "Miton" Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur

## *Readiness of Support Elements, Capacity and Value for E-Government Development in the "MITON" Application Development Administration Section Regional Secretariat of North Central Timor East Nusa Tenggara Province*

Aryanto Klau Fahik<sup>1)</sup>, Tora Akadira<sup>1)\*</sup> & Ipah Ema Jumiati<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Diterima: 09 Desember 2023; Direview: 14 Januari 2024; Disetujui: 12 Februari 2024

\*Corresponding Email: [toraakadira@ecampus.ut.ac.id](mailto:toraakadira@ecampus.ut.ac.id)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan pengembangan e-Government melalui Aplikasi Manajemen Informasi Terpadu Online (Miton) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah difokuskan pada 3 (tiga) Elemen penting Pengembangan e-Government yaitu Elemen Support, Elemen Capacity dan Elemen Value dengan didasarkan pada. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Indrajit (Indrajit 2016, 11-13) Data-data dikumpulkan melalui kuisisioner dan dianalisis secara kuantitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa. rata-rata tingkat kesiapan 3 (tiga) elemen sukses pengembangan e-Government pada aplikasi Miton adalah sebesar 75,5 % dengan rincian masing-masing elemen adalah sebagai berikut: (1) Elemen Support siap sebesar 78,59 %, (2) Elemen Capacity siap sebesar 70,75 %, (3) Elemen Value siap sebesar 77,14 %.

**Kata Kunci:** Elemen Support; Elemen Capacity; Element Value.

### Abstract

*This article aims to determine the extent of readiness for e-government development through the Online Integrated Information Management Application (Miton) in the Development Administration Section of the North Central Timor Regional Secretariat, East Nusa Tenggara Province. The problem focuses on 3 (three) important elements of e-Government Development, namely Support Elements, Capacity Elements, and Value Elements based on). To approach this problem, a theoretical reference from Indrajit, and an opinion from Indrajit (Indrajit 2016) was used. Data was collected through questionnaires and analyzed quantitatively. This study concluded that the average level of readiness of 3 (three) elements of successful e-government development in the Miton application it is 75.5% with the details of each element being as follows: (1) Support Elements are ready at 78.59%, (2) Capacity Elements are ready at 70.75%, (3) Value Elements are ready at 70.75% 77.14 %.*

**Keywords:** Support Element; Capacity Element; Value Element.

**How to Cite:** Fahik, A.K., Akadira, T., & Jumiati, I.E., (2024), Kesiapan Elemen Support, Capacity Dan Value Untuk Pengembangan E-Government Pada Aplikasi "Miton" Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(3): 1036-1045.



## PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk aplikasi berbasis Informasi Teknologi dimaksudkan untuk memudahkan kerja dan pelayanan publik yang diberikan. Jika demikian maka secara otomatis pikiran kita akan terarah kepada apa yang dikenal dengan *e-Government*. *E-Government* atau pemerintahan digital adalah “pemerintah melakukan kegiatannya dengan memanfaatkan dukungan dari teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat” hal ini diungkapkan oleh (A Hasibuan, Zainal; Harry 2005). Selain itu Kementrian Kominfo (Hardiyansah 2011) menggambarkan bahwa *e-Government* adalah pengelolaan aplikasi Teknologi informasi oleh pemerintah yang berbasis internet dan perangkat-perangkat digital lain-lainnya untuk kepentingan pemerintah dalam menyampaikan informasi kesemua lapisan Masyarakat, para pegawai, mitra-mitra bisnis, badan-badan usaha dan Lembaga-lembaga lain-lainnya disampaikan secara online.

Titik paling penting bahwa penekanan dalam *e-Government* harus pada 'pemerintah' dan bukan pada 'e' sebagaimana diungkapkan oleh OECD (Indrayani 2016). Secara umum ada 2 (dua) istilah yang seringkali menjadi ambigu dalam memaknainya yaitu *e-Governance* dan *e-Government*. Menurut pendapat dari (Nurhadryani 2009) “*e-Governance mencakup ruang lingkup yang luas yaitu mencakup banyak sektor dan level yang terkolaborasi menjadi satu sedangkan e-Government lebih dispesifikan atau dikosentrasikan pada satu sektor saja yaitu sektor publik*”. (Government 2022, 230–47) menggambarkan bahwa Indonesia berada di Ranking 77 dunia akibat masih rendahnya 3 (tiga) komponen utama *e-Government*: 1) Angka *Online Service Index (OSI)* 2) Angka *Human Capital Index (HCI)*, 3) Angka *Telecommunication Infrastructure Index (TII)*. Penerapan *e-Government* dimanfaatkan secara penuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. (Finger and Pécoud 2003; Madon and Madon 2009; Okot-Uma and London 2000) mengatakan bahwa *e-Good Governance* mempunyai karakteristik-karakteristik diantaranya adanya 1) Partisipasi dari semua elemen negara dalam membuat keputusan, 2) *Rule Of Law*, 3) *Transparency*, 4) *Responsiveness* 5) *Consensus orientation good governance*, 6) *Equity*, 7) *effectiveness and efficiency*, 8) *accountability*. Manfaat dari *e-Government* meliputi 1) *Government to Citizen* pemerintah dan masyarakat terhubung secara online. 2) *Government To Bussines* pemerintah dan pelaku bisnis terhubung secara online. 3) *Government to Governments* untuk pemerintah dan pemerintah 4) *Government to Employee* untuk kepentingan internal pemerintah (Indrajit 2016; Simamora 2023; Suheri et al. 2023). Indrajit (2016) juga menggambarkan terdapat 3 (tiga) elemen penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan *e-Government* yaitu: 1) *Support* dukungan dari sisi *Political Will*, menyangkut dukungan legalitas, perencanaan pendanaan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), serta sosialisasi yang baik. 2) *Capacity*, berupa tersedianya dana yang mencukupi, adanya SDM yang berkompentensi, dan adanya Pembangunan Infrastruktur IT yang memadai. 3). *Value* atau adanya manfaat yang didapat dari Pengembangan *e-Government*.

Penerapan *e-Government* akan memberikan ruang yang luas dan fleksibel bagi Pemerintah khususnya lini teknis berupa Perangkat Daerah untuk berlomba-lomba menciptakan dan mengembangkan berbagai bidang pekerjaan berbasis Aplikasi TI. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun satu Aplikasi Manajemen Informasi Terpadu Online (Miton) yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara yang hadir akibat dari keprihatinan unit ini terhadap ketersediaan data Realisasi Fisik dan Keuangan secara *real time* yang belum dimiliki selama ini, sehingga seringkali timbul keterlambatan bagi Pimpinan Wilayah dalam membuat suatu kebijakan public atau keputusan-keputusan strategis Pembangunan di wilayah ini. Dan ini adalah salah satu bentuk pengembangan *e-Government* di Kabupaten ini. Tetapi seberapa besar tingkat kesiapan aplikasi Miton sebagai salah satu bentuk pengembangan *e-Government* jika mengacu pada tiga elemen penting pengembangan *e-Government* yaitu *support*, *capacity* dan *value* perlu dijawab dengan analisis dan metode ilmiah yang tepat. Berikut beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan ke-3 elemen itu antara lain (Ratnasari, Noor, and Hidayati 2022) menyampaikan

bahwa pengembangan aplikasi SURADI oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sistem pemerintah berbasis online pada layanan administrasi pemerintahan di Kota Malang berjalan baik dengan menggunakan ke-5 elemen pengembangan *e-Government* yaitu *support, capacity, value, willingness, dan local culture*. Adapun ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan SURADI, maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terhadap pengembangan *e-Government* yang didasarkan pada lima elemen sesuai dengan faktor pendukung yang telah tersedia. (Rumimpunu, Tampi, and Londa 2021) menyatakan bahwa masih belum berjalan dengan baik Implementasi *e-Government* di Kota Manado akibat Dinas Komunikasi dan Informatika terkendala kendala dalam pelaksanaannya karena pegawai yang kurang, pendanaan yang sedikit, sarana dan prasarana masih belum mendukung, partisipasi yang kurang dari masyarakat, pemerintah kurang komitmen dari pemerintah akibatnya berdampak pada transparansi dan keterbukaan informasi publik. (Kautsar and Saefullah 2022) mengatakan bahwa Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi merupakan aspek-aspek yang sangat memberi pengaruh di dalam proses pengimplementasian *e-Government* pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

Tujuan penulisan ini adalah dalam rangka mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat kesiapan elemen Support, capacity dan value untuk pengembangan *e-government* pada aplikasi “Miton” di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian akan memberikan manfaat dan andil lebih untuk proses analisis kebijakan publik maupun kebijakan-kebijakan strategis pembangunan lainnya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian Deskriptif kuantitatif dengan maksud agar peneliti dapat menggambarkan dengan sebenar-benarnya tentang tingkat kesiapan dari pengembangan *e-Government* melalui implementasi Aplikasi Miton di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini kemudian dimanfaatkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono 2017).

Sumber data primer diambil dari sampel sejumlah 54 Orang dari populasi sebanyak 62 orang yang penentuan sampelnya menggunakan rumus Slovin (Aschilati, Prasetyo, and Irawan 2019). Tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 5 %. Rumus Slovin.

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Dimana : n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan

Instrumen penelitian menggunakan angket yang disebar dan memuat aspek-aspek yang diteliti dengan menerapkan jenis skala *Guttman*. Nilai tertinggi (1) untuk jawaban **Ya** dan terendah (0) untuk jawaban **Tidak**. Analisis data dengan SPSS Versi IBM SPSS Statistics 27.0.1. Untuk menguji: 1) Validitas Data, 2) Reliabilitas Data, 3) Deskripsi data untuk mendapatkan gambaran tentang nilai prosentase yang dicapai masing-masing variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Manajemen Informasi Terpadu Online (MITON) merupakan Aplikasi Online milik Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang diinisiasi dan dibuat oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara. Dasar pembuatan aplikasi adalah Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 66 tahun 2022 Tentang Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Berbasis Elektronik menggunakan Aplikasi Miton (Manajemen Informasi Terpadu Online) di Lingkungan Pemerintah Daerah Timor Tengah Utara. Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa Aplikasi Miton adalah Aplikasi yang digunakan sebagai media penyampaian laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Secara Elektronik. Pembuatan aplikasi Miton ini semata-

mata hanya untuk membantu meningkatkan kinerja inisiator yang dibarengi dengan ketepatan, kecepatan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah Timor Tengah untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis, menjalankan, mengendalikan dan mengevaluasi program-program Pembangunan. Aplikasi ini adalah merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang telah didigitalisasi hal ini termuat pada Konsideran Mengingat point 8 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 66 tahun 2022 Tentang Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Berbasis Elektronik menggunakan Aplikasi Miton ini. Namun cukup disayangkan Aplikasi ini belum terintegrasi dengan aplikasi milik Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dinamakan *e-Monev*.

Hal yang perlu digaris bawahi bahwa aplikasi Miton hadir untuk memperkuat suatu proses Kebijakan yang diambil menjadi tepat. (Finger and Pécoud 2003; Madon and Madon 2009; Okot-Uma and London 2000) memerinci bahwa proses kebijakan public meliputi analisis kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Aplikasi Miton hadir dalam rangka mendukung data proses-proses itu sebagaimana isi dari aplikasi ini memuat tentang gambaran program dan kegiatan Pembangunan yang disusun oleh masing-masing unit kerja Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Setelah dilakukan penelitian dengan cara menyebarkan kuisisioner ke 54 (lima puluh empat) responden yang difokuskan pada 3 (tiga) elemen penting pengembangan *e-Government* yaitu Elemen Support, Capacity dan Value maka dihasilkan hal-hal sebagaimana digambarkan pada bahasan dibawah ini:

### **Tingkat kesiapan elemen Support bagi pengembangan *E-Government* pada Aplikasi Miton di Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (X1)**

Hasil penelitian terhadap Tingkat kesiapan elemen Support bagi pengembangan *E-Government* pada Aplikasi Miton di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur ( X1 ) dengan cara menyebarkan kuisisioner ke 54 (lima puluh empat) responden dengan butir pernyataan sebanyak 23 (dua puluh tiga) yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan Elemen Support pengembangan *E-Government* diantaranya: 1) Adanya prioritas dan kemauan pemerintah yang tentu saja hal ini identik dengan *Political Will*, 2) Kesiapan sarana infrastruktur telekomunikasi, 3) Kondisi Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan seperti jumlah tenaga yang berkemampuan IT, 4) Anggaran yang disediakan saat ini dan yang direncanakan/diharapkan, 5) Sosialisasi aplikasi sebelum dijalankan.

Hasil penelitian terhadap 5 (lima) poin penting Elemen Support untuk pengembangan *E-Government* pada Aplikasi Miton Bagian Administrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa sebesar 78,59 % menjawab “Ya” dan 21,28 % menjawab “Tidak”. Hasil ini menunjukkan bahwa ada dukungan secara politik atau *political will* oleh Eksekutif, Legislatif, tersedia anggaran, SDM, infrastruktur serta telah pula dilakukan sosialisasi secara baik saat penerapan aplikasi ini. Hasil penelitian inipun sejalan dengan hasil peneltian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ratnasari, Noor, and Hidayati 2022) yang meneliti untuk melihat sejauh mana SURADI sebagai bentuk pengembangan *e-government* yang dianalisis berdasarkan konsep pengembangan *e-Government* secara teoritis. Adapun elemen pengembangan *e-Government* tersebut meliputi *support, capacity, value, willingness, dan local culture*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan SURADI oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sistem pemerintah berbasis online pada layanan administrasi pemerintahan di Kota Malan berjalan baik dengan menggunakan ke-5 elemen pengembangan *e-Government* dengan baik. Namun Disisi lain berdasarkan gambaran hasil penelitian yang telah diolah dengan aplikasi SPSS 27.0.1 pada tabel 1. dibawah ini menunjukkan bahwa ada setidaknya 2 (dua) butir



jawaban pernyataan yang prosentase jawaban “Ya” -nya dibawah 50%. sedangkan sebaliknya jawaban yang menonjol adalah jawaban “Tidak”. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Deskripsi Jawaban Pernyataan 1

P	Rata-rata (Mean)	Standar Deviasi	Prosentase Jawaban (%)	
			Ya (1)	Tidak (0)
1	0,78	0,420	77,8	22,2
2	0,93	0,264	92,6	7,4
3	0,93	0,264	92,6	7,4
4	0,76	0,432	75,9	24,1
5	0,78	0,420	77,8	22,2
6	0,80	0,407	79,6	20,4
7	0,89	0,317	88,9	11,1
8	0,89	0,317	88,9	11,1
9	0,70	0,361	70,4	29,6
10	0,78	0,420	77,8	22,2
11	0,83	0,376	83,3	16,7
12	0,41	0,376	40,7	59,3
13	0,76	0,396	75,9	24,1
14	0,85	0,432	85,2	14,8
15	0,83	0,359	87,3	16,7
16	0,78	0,376	77,8	22,2
17	0,39	0,420	38,9	61,1
18	0,78	0,492	77,8	22,2
19	0,85	0,420	85,2	14,8
20	0,80	0,359	79,6	20,4
21	0,87	0,407	87,00	13,00
22	0,85	0,339	85,2	14,8
23	0,81	0,359	81,5	18,5
			<b>78,59</b>	<b>21,58</b>

Sumber: Diolah dengan SPSS Versi 27.0.1

Setelah dianalisis maka poin pernyataan nomor 12 dan 17 yang prosentase jawaban “Tidak” lebih tinggi semuanya disebabkan oleh peran dari SDM TI yang dimiliki. Pada poin 12 dengan bunyi pernyataan “Saudara sebagai user mengalami kesulitan dalam memanfaatkan menu-menu yang disediakan oleh aplikasi ini “Jawaban didominasi oleh jawaban “Tidak” sebesar 59,3 % berbanding dengan 40,7 % jawaban “Ya”. Ternyata jawaban terhadap pernyataan ini sangat diharapkan karena dengan jawaban ini maka dapat diukur sejauh mana kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pemanfaat aplikasi Miton mendukung kelancaran pemanfaatan aplikasi Miton ini.

Selanjutnya pada Pernyataan poin 17 dengan bunyi pernyataan sebagai berikut: Sebagian besar ibu Kota 24 (Dua Puluh Empat) Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara telah tercakupi Infrastruktur IT khususnya jangkauan internet. Jawaban didominasi oleh jawaban “Tidak” sebesar 61,1 % berbanding dengan 38,1 % jawaban “Ya”. Setelah didalami ternyata aplikasi ini bisa berjalan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para user yang tersebar di 24 (dua puluh empat) kecamatan walaupun terkendala ketersediaan infrastruktur akibat dari sebagian besar ibu kota kecamatan belum terjangkau jaringan internet dengan baik. Hal yang mendominasi keberhasilan penerapan *e-government* pada pemanfaatan aplikasi ini adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) atau sebut saja ASN yang diberi tugas untuk menjalankan aplikasi ini. ASN-ASN ini adalah orang-orang yang berkompentensi dan memiliki kemampuan *leadership* yang baik. McConel (dalam Indrajit, 2016) meletakkan factor *leadership* sebagai salah satu variabel dalam menentukan negara mana saja yang telah siap menerapkan konsep *e-Government* (Riau, Akadira, and Diana 2023, 415) menyatakan bahwa: “Penyebab organisasi gagal melakukan perubahan

adalah karena mereka tidak bisa keluar dari masa lalu dan masa lalu tidak bisa memasuki masa depan. Hal ini memerlukan kekuatan kepemimpinan organisasi dengan menghadirkan organisasi menuju transformasi". Dengan demikian kekuatan kepemimpinan atau *leadership* bisa menjadi salah satu factor penting untuk melaksanakan perubahan. SDM/ASN yang ditugaskan dalam menjalankan aplikasi ini mempunyai kompetensi dan tahu bagaimana merespon serta mengelola kejadian/masalah kerja sesuai dengan karakteristik pekerjaan dan keadaan yang berbeda-beda tentu saja mereka yang ditugaskan untuk menjalankan aplikasi Miton ini memiliki kriteria-kriteria kompetensi Sikap Kerja yang baik. (Kadarisman 2021) menyatakan bahwa Kriteria aspek kompetensi SDM meliputi: 1) Pengetahuan terhadap pekerjaan yang digeluti, 2) Mempunyai ketrampilan dalam bekerja secara individual, mampu menjalankan tugas-tugas yang berbeda-beda dalam suatu pekerjaan, kemampuan merespon dan mengelola persoalan kerja yang berbeda, bisa menjalankan tugas-tugas khusus sesuai dengan kebutuhan, bisa menyesuaikan/beradaptasi melaksanakan pekerjaan yang sama dengan disekitar lingkungan kerja kita masing-masing. 3) Sikap kerja kompetensi SDM menekankan bagaimana individu mampu berbuat, menyikapi dan juga menghadapi segala situasi dan permasalahan secara baik dengan nilai yang baik pula.

Ini menunjukkan bahwa SDM memiliki peranan yang sangat dominan dalam kesuksesan penerapan Aplikasi Miton, walaupun Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) belum memadai tetapi apabila SDM didukung oleh *leadership* yang baik serta kompetensi sikap kerja seperti pengetahuan, responsive kemampuan adaptasi yang tinggi dengan lingkungan, niscaya suatu organisasi akan lebih mudah dalam mencapai tujuan organisasinya.

### Tingkat kesiapan elemen Capacity bagi pengembangan E-Government pada Aplikasi Miton di Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (X2)

Hasil Penelitian terhadap Tingkat kesiapan elemen Capacity bagi pengembangan *e-Government* pada Aplikasi Miton di Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur ( X2 ) dengan cara menyebarkan kuisisioner ke 54 (lima puluh empat) responden dengan butir pernyataan sebanyak 10 (sepuluh) yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan Elemen Capacity pengembangan E-Government diantaranya : 1) Alokasi Anggaran yang Memadai indikatornya adalah DPA dan DPPA, 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Berkemampuan TI indikatornya adalah Pendidikan Terakhir, Banyaknya Pelatihan yang diikuti, Sebaran SDM Berkemampuan TI di Perangkat Daerah, 3) Infrastruktur yang telah terbangun indikatornya adalah Adanya perangkat Software dan Hardware, Luasan sebaran Internet di kabupaten TTU. Hasil penelitian terhadap 3 (tiga) poin penting Elemen Capacity untuk pengembangan E-Government pada Aplikasi Miton Bagian Administrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa sebesar 70,75 % menjawab "Ya" dan 27,58 menjawab "Tidak". Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Deskripsi Jawaban Pernyataan Elemen Capacity 1

P	Rata-rata (Mean)	Standar Deviasi	Prosentase Jawaban (%)	
			Ya (1)	Tidak (0)
24	0,85	0,420	85,2	14,8
25	0,67	0,264	66,7	33,3
26	0,65	0,264	64,8	35,2
27	0,70	0,432	70,4	29,6
28	0,28	0,420	27,8	72,2
29	0,81	0,407	81,5	18,5
30	0,70	0,317	70,4	29,6
31	0,69	0,317	68,5	29,6
32	0,87	0,361	87,0	13,0
33	0,85	0,420	85,2	13,0
			<b>70,75</b>	<b>27,58</b>

Sumber: Hasil Olahan SPSS 27.0.1

Hasil ini menegaskan bahwa Elemen Capacity untuk pengembangan *e-Government* pada bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur telah siap 70,75 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada dukungan anggaran, SDM juga infrastruktur saat penerapan aplikasi ini.

Hasil penelitian inipun sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Noviyanti, Raka, and Larantika 2021) yang meneliti untuk melihat sejauh mana Implementasi *e-Government* dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. Hasil temuan penelitian disimpulkan bahwa: 1) Implementasi *e-Government* dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah terimplementasi dengan diterapkannya sistem online pajak daerah melalui e-SPTPD. 2) Faktor pendukung implementasi *e-Government* dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung meliputi: komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelayanan publik melalui *e-Government*, *resources* (sumber daya), sosialisasi, jaringan internet, dan kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi *e-Government* dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung meliputi: pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta pandemi Covid-19. Disini khusus untuk poin 2 (dua) hasil penelitian ini memberikan gambaran betapa pentingnya sumber daya baik itu manusia maupun dana serta jaringan internet yang memadai memiliki peran penting untuk kesuksesan penerapan aplikasi *e-Government*.

Disisi lain berdasarkan gambaran hasil penelitian yang telah diolah dengan aplikasi SPSS 27.0.1 pada tabel 4.8 diatas ini menunjukkan bahwa ada setidaknya 1 (satu) butir jawaban pernyataan yang prosentase jawaban “**Ya**” -nya dibawah 50 %. sedangkan sebaliknya jawaban yang menonjol adalah jawaban “**Tidak**”. Hasil olahan pada tabel diatas jelas sekali menunjukkan adanya perbedaan prosentase jawaban pada poin pernyataan nomor 28 dibandingkan dengan jawaban pernyataan lainnya. Pada pernyataan poin 28 yang bunyi pernyataannya sebagai berikut: “Ada dana yang mencukupi untuk pelatihan TI dalam rangka mendukung kemampuan admin/user aplikasi Miton” Jawaban yang diberikan didominasi oleh jawaban “**Tidak**” sebesar 72,2 % berbanding 27,8 % jawaban “**Ya**”. Jawaban ini menjadi suatu pernyataan yang perlu untuk didalami lagi karena kenyataannya aplikasi ini bisa berjalan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para user yang tersebar di 62 (enam puluh dua) perangkat daerah walaupun terkendala ketersediaan dana bagi pelatihan TI yang kurang memadai. Suksesnya pengembangan *e-Government* jika ditinjau dari elemen Capacity ketersediaan Dana yang cukup menjadi syarat mutlak termasuk pula bagi pengembangan kapasitas SDM yang mumpuni. Tetapi kenyataan yang didapatkan bahwa sebagian besar User aplikasi ini tidak didukung dengan pendanaan yang cukup untuk bisa mendapat pelatihan TI yang baik dan cukup tetapi dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan baik. Hal ini setelah didalami ternyata ada 2 (dua) hal yang mempengaruhi: 1) Adanya sosialisasi dan juga tersedianya modul yang baik tentang tata cara pemanfaatan aplikasi Miton ini. 2) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menerapkan sistem merit (*merit system*) sebagaimana diungkapkan oleh (Kadarisman 2021, 3.14) yaitu adanya kesesuaian antara kecakapan yang dimiliki seseorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya meliputi tingkat Pendidikan formal, tingkat Pendidikan non formal atau diklat-diklat tingkat pengalaman kerja serta tingkat penguasaan tugas dan pekerjaan. Dalam penerapan merit sistem ini hal utama yang menjadi pertimbangan adalah kecakapan yang dimiliki oleh SDM tanpa memandang status lainnya seperti politik, ras, warna kulit ataupun kondisi kecacatan seseorang. Kedua hal ini menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Pemda Timor Tengah Utara karena akan terjadi penghematan anggaran dari sisi pengembangan SDM imbasnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan urgen lainnya dalam Pembangunan di Kabupaten ini.

### **Tingkat Kesiapan Elemen Value Pengembangan E-Government pada Aplikasi Miton di Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur ( X3 )**



Hasil Penelitian Tingkat kesiapan elemen Value bagi pengembangan *E-Government* pada Aplikasi Miton di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (X3) dengan cara menyebarkan kuisioner ke 54 (lima puluh empat) responden dengan butir pernyataan sebanyak 7 (tujuh) yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan Elemen Value pengembangan E-Government dengan maksud untuk mengetahui kesiapan aplikasi Miton dalam menyiapkan data serta manfaat lain aplikasi misalnya diantaranya kemudahan akses informasi, kemudahan kerja instansi-instansi di pemerintahan, relasi pemerintah terkoneksi dengan mudah dan dapat dikontrol dengan baik, serta tentu saja mewujudkan pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan transparan

Deskripsi pernyataan yang dibuat dalam kuisioner ini menggambarkan output-output yang dihasilkan oleh aplikasi ini apakah hanya dimanfaatkan oleh siapa saja dan untuk kepentingan apa serta apakah aplikasi ini dapat terkoneksi dengan aplikasi lainnya. Setelah dilakukan penelitian didapatkan responden yang menjawab “Ya” sebesar 77,14 % sedangkan jawaban “Tidak” sebesar 22,42. Jika dihubungkan dengan Hipotesis yang dibuat maka hasil ini menggambarkan bahwa hipotesis yang dibuat dengan bunyi Aplikasi Miton Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur telah siap sebagai suatu bentuk pengembangan *e-Government* karena didukung oleh elemen *Value* sebesar 70 % (tujuh puluh persen) diterima, sebab nilai 77,14 % mempunyai rentang 7,14 % diatas nilai hipotesis yang dibuat. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel. 3 Deskripsi jawaban pertanyaan elemen value dibawah ini.

**Tabel 3. Deskripsi Jawaban Pernyataan Elemen Value 1**

P	Rata-rata (Mean)	Standar Deviasi	Prosentase Jawaban (%)	
			Ya (1)	Tidak (0)
34	0,94	0,233	92,6	5,6
35	0,91	0,293	90,7	9,3
36	0,56	0,502	55,6	44,4
37	0,56	0,502	55,6	44,4
38	0,81	0,392	81,5	18,5
39	0,70	0,461	70,4	29,6
40	0,94	0,231	94,4	5,6
<b>Prosentase</b>			<b>77,14</b>	<b>22,42</b>

Sumber: Hasil Olahan SPSS 27.0.1

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa ada 2 (dua) nilai prosentase jawaban “Ya” yang berada sedikit di atas 50 %. Poin dimaksud adalah poin pernyataan nomor 36 dan 37. Poin pernyataan nomor 36 berbunyi “Output dari aplikasi ini hanya dimanfaatkan untuk perencanaan internal unit kerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara “ Sedangkan poin 37 bunyi pernyataannya adalah: “Kebutuhan data untuk perencanaan telah terpenuhi sepenuhnya dengan adanya aplikasi ini “ Jawaban untuk poin pernyataan nomor 36 dan 37 ini adalah masing-masing 55,6 % untuk jawaban “Ya” dan sisanya 44,4 % untuk jawaban “Tidak” Hasil ini menegaskan bahwa untuk poin pernyataan nomor 36 output dari aplikasi ini bukan hanya dimanfaatkan oleh Bagian administrasi Pembangunan Setda Timor Tengah Utara tetapi dapat juga menunjang instansi ataupun unit lainnya untuk memanfaatkan output dari aplikasi Miton. Jika hal ini dihubungkan dengan manfaat-manfaat dari pengembangan *E-Government* yang diungkapkan oleh (Indrajit 2016) maka terdapat beberapa manfaat antara lain: 1) *G - to- C* atau *Government to Citizen* yang mana TI dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun kanal-kanal akses yang beragam untuk mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakatnya berdasarkan pada ruang lingkup pelayanan yang diemban oleh masing-masing unit pemerintah. 2) *G-to-B* atau *Government To Bussines* yaitu TI dibangun untuk mengakomodir serta mempermudah pelayanan pemerintah kepada pelaku Bisnis karena banyak sekali data yang dibutuhkan oleh pelaku Bisnis dari pemerintah begitupun mempermudah dukungan dari pihak industri swasta kepada



memerintah dalam rangka keikut sertaannya dalam mewujudkan pembangunan. Selain itu, hubungan yang terjadi antara kalangan pebisnis dengan Lembaga-lembaga pemerintahan juga bertalian dengan hak dan kewajiban dari kalangan pebisnis tersebut sebagai *entity* yang orientasinya profit-profit. 3) *G-to-G* atau *Government to Governments* dengan maksud memanfaatkan TI untuk kepentingan hubungan antar pemerintah dengan pemerintah untuk membangun kerjasama yang baik dalam berbagai bidang misalnya politik, hukum, perdagangan orang, pertahanan keamanan, ekonomi dan lain sebagainya. 4) *G-to-E* atau *Gornment to Employee* dimaksudkan untuk mempermudah dalam peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri atau karyawan yang bekerja disejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Dengan demikian pengembangan aplikasi ini memberikan manfaat yang lebih besar karena bukan saja dibuat untuk kepentingan unit Bagian administrasi pembangunan Setda Timor Tengah Utara tetapi lebih lagi bermanfaat untuk stakeholder pembangunan lainnya. Selanjutnya jika dicermati untuk pernyataan nomor 37 maka manfaat aplikasi ini untuk menyediakan data perencanaan belum sepenuhnya dipercayai karena hampir 50 % atau tepatnya 44,4 % responden menjawab “**tidak**” hal ini bisa dimaknai bahwa tingkat kepercayaan responden terhadap kesiapan aplikasi ini untuk menyediakan data masih perlu diperkuat lagi. Tetapi hal ini dianggap wajar sebab aplikasi ini masih tergolong minim disebabkan oleh karena output dari aplikasi ini belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh stakeholder-satkeholder Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara. selain itu aplikasi ini belum terkoneksi dengan aplikasi lainnya seperti *SIPD* maupun *F-Miss* yang memiliki ranah urusan yang hampir sama yaitu mengurus bidang perencanaan dan keuangan di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Tetapi disini lainnya aplikasi ini menjadi salah satu jalan yang mendukung Pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan efisisensi dalam mendukung Administrasi pemerintahan serta manajemen pemerintahan yang lebih baik. Serta tentu saja value lain yang didapatkan adalah penghematan anggaran yang cukup besar karena kebutuhan akan data bisa segera didapatkan tanpa harus mendatangi unit masing-masing untuk menjemput data Relisasi Fisik dan Keuangan masing-masing Unit kerja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 59 Satuan Kerja dan tersebar ke seantero Kabupaten Timor Tengah Utara seluas 2.670 km<sup>2</sup>. Adanya aplikasi ini telah berhasil mewujudkan karakteristik-karakteristik *Good Governance* yang diungkapkan oleh (Finger and Pécoud 2003; Madon and Madon 2009; Okot-Uma and London 2000)khususnya adanya *transparency*, *responsive* terhadap keadaan khususnya proses Pembangunan, *consensus orientation*, *good governance* untuk mendapatkan solusi/jalan keluar terbaik terhadap suatu persoalan dan harus procedural serta *effectiveness and efficiency* untuk menjalankan proses-proses pembangunan. Perbaikan-perbaikan dan penentuan kebijakan-kebijakan Pembangunan yang lebih tepat lagi setiap saatnya kebijakan.

Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukannya peran dominan dari indikator SDM yang berkompetensi baik mampu mengatasi masalah minimnya dana dan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan *e-Government* di Kabupaten Timor Tengah Utara. yang mana Indikator ketersediaan dana dan infrastruktur adalah indikator-indikator wajib yang dibutuhkan untuk pengembangan *e-Government*. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif yang merupakan metode yang jarang dipergunakan dalam penelitian-penelitian Ilmu Administrasi Publik sehingga menjadi suatu nilai tersendiri dan menjadi bahan acuan penting bagi para peneliti lainnya dengan objek yang sama. Aplikasi Miton juga menjadi salah satu aplikasi contoh yang baik bagi pengembangan e-Government yang baik di Kabupaten Timor Tengah Utara

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat kesiapan Elemen Support, Capacity dan Value untuk pengembangan *e-Government* pada Aplikasi Miton tinggi dengan rata-rata prosentase ketiga elemen itu adalah berada pada kisaran angka prosentase sebesar 75,5 %. Poin penting hasil penelitian 1) Ada Peran Pimpinan daerah dan legislative dalam mendukung

aplikasi ini, 2) SDM yang berkompeten yang direkrut dengan sistim merit berhasil mengatasi masalah-masalah pemanfaatan aplikasi. 3) Factor *leadership* berperan dalam suksesnya aplikasi ini 4) Aplikasi Miton membantu mewujudkan *good governance* khususnya *transparency, responsive, consensus orientation, good governance* untuk mendapatkan solusi/jalan keluar terbaik terhadap suatu persoalan dan procedural serta *effectiveness and efficiency* untuk menjalankan proses-proses Pembangunan. 5) Penelitian ini kemudian memberi manfaat sebagai bahan landasan ilmiah serta acuan bagi peneliti lainnya dalam meneliti fokus penelitian yang memiliki karakteristik serta variabel penelitian yang hampir sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aslichati, L., Prasetyo, H. B., & Irawan, P. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- A Hasibuan, Zainal; Harry, B Santoso. 2005. "Standardisasi Aplikasi E-Government Untuk Instansi Pemerintah." *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia* (May 2005): 42-48.
- Finger, Matthias, and Gaëlle Pécoud. 2003. "From E-Government to E-Governance? Towards a Model of E-Governance." *Electronic Journal of E-government* 1(1): pp52-62.
- Government, Digital. 2022. *E-Government Survey 2022*.
- Indrajit, Richardus Eko. 2016. "Konsep Dan Strategi Electronic Government." *Yogyakarta: Andi Yogyakarta*.
- Indrayani, Etin. 2016. *Ipdn E-Government Konsep, Implementasi Dan Perkembangannya Di Indonesia (Buku Literatur MK E-Government)*.
- Kautsar, Y A, and D Saefullah. 2022. "Implementasi Kebijakan E-Government Pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kota Bandung." *Scientia Regendi* 3(2): 1-14.
- Madon, Shirin, and Shirin Madon. 2009. *E-Governance for Development*. Springer.
- Noviyanti, Ni Made, A. A. Gde Raka, and A.A. Ayu Dewi Larantika. 2021. "Implementasi E-Government Dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 6(2): 85-96.
- Nurhadryani, Yani. 2009. "Memahami Konsep E-Governance Serta Hubungannya Dengan E-Government Dan E-Demokrasi." *Seminar Nasional Informatika 2009(semnasIF)*: 111-17.
- Okot-Uma, Rogers W'O, and Commonwealth Secretariat London. 2000. "Electronic Governance: Re-Inventing Good Governance." *Commonwealth Secretariat, London* 5.
- Ratnasari, Mega Oktavia Budi, Irwan Noor, and Firda Hidayati. 2022. "Analisis Pengembangan E-Government Pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi Pada 'SURADI' Di Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Malang)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 008(01): 35-44.
- Riau, Dwi Putranto, Tora Akadira, and Bambang Agus Diana. 2023. "Improvement Licensing Services Based Digital on Building Management Information System (SIMBG)." *KnE Social Sciences* 2023: 414-29.
- Rumimpunu, Sofany Russo, Johny R E Tampi, and Very Y Londa. 2021. "Implementation of E-Government in Support of Transparency and Public Disclosure (Case Study in Official Website of Government of Manado City)." *Agri-SosioEkonomi Unsrat* 17(2): 691-702.
- Simamora, Beltahmamero. 2023. "Efforts to Reform State Civil Apparatus Management in the Face of Globalization." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5(4): 2565-72.
- Sugiyono. 2017. *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suheri, Ana, Nurdin I Muhammad, Ade Risna, and Pandu Adi Cakranegara. 2023. "The Analysis of the Role of Technological Transformation in Accelerated Local Government Bureaucracy Reform." *Perspektif* 12(2): 479-91. <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/download/8744/4845>.

